



FORMULIR 1
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2014

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

I. VISI

No	Uraian Visi
01	Tegaknya Konstitusi dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum dan Demokrasi Demi Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan Yang Bermartabat

II. MISI

No	Uraian Misi
01	Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Salah Satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman Yang Modern dan Terpercaya
02	Membangun Konstitusionalitas Indonesia dan Budaya Sadar Berkonstitusi

III. SASARAN STRATEGIS

No	Uraian Sasaran Strategis
01	Terwujudnya layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses
02	Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK
03	Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap MK
04	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
05	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya
06	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang moderen dan terpercaya
07	Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan
08	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi
09	Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat
10	Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat
11	Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif
12	Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (integrated knowledge management) yang terpadu
13	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik
14	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Pengelolaan Anggaran

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output	Prioritas (N/B/KL)	Prio Ke-	Target/Volume 2014	Pencapaian Target/Volume			ALOKASI 2014
						2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI								8,226.2
3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah								0.0
	01 Terselenggaranya Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah								0.0
		001 Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis	KL	0	0	4	4	4	0.0
		001 Peraturan MK dan Petunjuk Teknis			0.0	4.0	4.0	4.0	0.0
		002 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial	KL	0	0	3	3	3	0.0
		002 Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial			0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana								463.6
	01 Terselenggaranya Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana								463.6
		001 Jumlah Dokumen Rencana Kerja, Evaluasi Kinerja dan Anggaran	KL	0	5	6	6	6	304.9
		001 Dokumen Rencana Kerja, Evaluasi Kinerja dan Anggaran			5.0	6.0	6.0	6.0	304.9
		002 Jumlah Kegiatan Pengawasan, Pengembangan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	KL	0	4	4	4	4	158.7
		002 Kegiatan Pengawasan, Pengembangan Organisasi dan Reformasi Birokrasi			2.0	4.0	4.0	4.0	158.7
3368	Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian Perkara, Perpustakaan, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi								6,607.1
	01 Terselenggaranya Penelitian, Pengkajian Perkara, Perpustakaan, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi								6,607.1
		001 Jumlah Sistem Informasi	KL	0	3	4	4	4	5,068.6
		001 Sistem Teknologi dan Informasi Penanganan Perkara			3.0	4.0	4.0	4.0	5,068.6
		002 Jumlah Penelitian dan Kajian Perkara	KL	0	5	6	6	6	1,471.2
		002 Penelitian dan Kajian Perkara			5.0	6.0	6.0	6.0	1,471.2
		003 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan	KL	0	1	1	3	3	67.3
		003 Terselenggaranya Pengelolaan Perpustakaan			1.0	2.0	4.0	4.0	67.3
5237	Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi								0.0
	01 Terselenggaranya Kegiatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK serta Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK								0.0
		001 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK	B	08	0	0	0	0	0.0
		001 Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian								1,155.5
	01 Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian								1,155.5

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output	Prioritas (N/B/KL)	Prio-Ke-	Target/Volume 2014	Prakiraan Target/Volume			ALOKASI 2014
						2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		001 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	KL	0	3	15	15	15	1,155.5
		001 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai			3.0	15.0	15.0	15.0	1,155.5
06	Program Penanganan Perkara Konstitusi								86,778.7
3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya								86,778.7
	01 Terwujudnya Penyelesaian Perkara Konstitusi yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel								86,778.7
		001 Jumlah Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya yang diputus	B	01	247	253	265	265	86,778.7
		001 Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya yang diputus			247.0	253.0	265.0	265.0	86,778.7
07	Program Kesadaran Berkonstitusi								0.0
3373	Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK serta Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK								0.0
	01 Terlaksananya Kegiatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK serta Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK								0.0
		001 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK	B	08	0	0	0	0	0.0
		001 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		002 Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK	B	08	0	0	0	0	0.0
		002 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	JUMLAH								95,004.9



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2014
(REKAPITULASI UNIT ORGANISASI)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kode	Unit Organisasi	Alokasi 2013	Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)		
			Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4+5+6+7)	(9)	(10)	(11)
01	Mahkamah Konstitusi RI	199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0
TOTAL		199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2014
(REKAPITULASI PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kode	Program	Alokasi 2013	Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)		
			Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4+5+6+7)	(9)	(10)	(11)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	82,844.5	65,709.7	0.0	0.0	0.0	65,709.7	90,000.0	92,238.0	92,238.0
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	36,600.0	36,014.7	0.0	0.0	0.0	36,014.7	20,000.0	15,000.0	15,000.0
06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	80,396.1	86,778.7	0.0	0.0	0.0	86,778.7	88,000.0	91,000.0	91,000.0
07	Program Kesadaran Berkonstitusi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL		199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2014
(REKAPITULASI PROVINSI)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kode	Provinsi	Alokasi 2013	Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)		
			Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4+5+6+7)	(9)	(10)	(11)
00	Pusat	199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0
TOTAL		199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0

4



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2014
(REKAPITULASI KABUPATEN/KOTA PER PROVINSI)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi 2013	Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)		
			Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SB5N	Jumlah	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4+5+6+7)	(9)	(10)	(11)
00	Pusat	199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0
00.00	Pusat	199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0
TOTAL		199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0

2



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2014
(RINCIAN KEGIATAN PER PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi 2013	Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)		
			Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4+5+6+7)	(9)	(10)	(11)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	82,844.5	65,709.7	0.0	0.0	0.0	65,709.7	90,000.0	92,238.0	92,238.0
3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah	17,251.9	4,807.2	0.0	0.0	0.0	4,807.2	20,982.3	21,220.3	21,220.3
3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana	1,568.8	463.6	0.0	0.0	0.0	463.6	2,476.8	2,876.8	2,876.8
3368	Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian Perkara, Perpustakaan, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	8,383.9	6,607.1	0.0	0.0	0.0	6,607.1	8,815.4	10,415.4	10,415.4
3369	Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	25,678.1	27,656.0	0.0	0.0	0.0	27,656.0	28,761.3	28,761.3	28,761.3
5237	Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian	29,961.8	26,175.8	0.0	0.0	0.0	26,175.8	28,964.2	28,964.2	28,964.2
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	36,600.0	36,014.7	0.0	0.0	0.0	36,014.7	20,000.0	15,000.0	15,000.0
3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	0.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0
3371	Pengadaan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Gedung	36,600.0	32,514.7	0.0	0.0	0.0	32,514.7	16,500.0	11,500.0	11,500.0
06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	80,396.1	86,778.7	0.0	0.0	0.0	86,778.7	88,000.0	91,000.0	91,000.0
3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya	80,396.1	86,778.7	0.0	0.0	0.0	86,778.7	88,000.0	91,000.0	91,000.0
07	Program Kesadaran Berkonstitusi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3373	Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK serta Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL		199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

2. Nama Unit Organisasi : Mahkamah Konstitusi RI

3. Misi Unit Organisasi :	<table><tr><th>No</th><th>Misi</th></tr><tr><td>01</td><td>Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya</td></tr><tr><td>02</td><td>Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi</td></tr></table>	No	Misi	01	Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya	02	Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi
No	Misi						
01	Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya						
02	Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi						

4. Sasaran Strategis :	<table><tr><th>No</th><th>Mendukung Sasaran Strategis</th></tr><tr><td>01</td><td>Terwujudnya layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses</td></tr><tr><td>02</td><td>Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK</td></tr><tr><td>03</td><td>Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap MK</td></tr><tr><td>04</td><td>Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi</td></tr><tr><td>05</td><td>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya</td></tr><tr><td>06</td><td>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang moderen dan terpercaya</td></tr><tr><td>07</td><td>Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan</td></tr><tr><td>08</td><td>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi</td></tr><tr><td>09</td><td>Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat</td></tr><tr><td>10</td><td>Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat</td></tr><tr><td>11</td><td>Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif</td></tr><tr><td>12</td><td>Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (integrated knowledge management) yang terpadu</td></tr><tr><td>13</td><td>Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik</td></tr><tr><td>14</td><td>Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Pengelolaan Anggaran</td></tr></table>	No	Mendukung Sasaran Strategis	01	Terwujudnya layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses	02	Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK	03	Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap MK	04	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi	05	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya	06	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang moderen dan terpercaya	07	Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan	08	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi	09	Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat	10	Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat	11	Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif	12	Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (integrated knowledge management) yang terpadu	13	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik	14	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Pengelolaan Anggaran
No	Mendukung Sasaran Strategis																														
01	Terwujudnya layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses																														
02	Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK																														
03	Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap MK																														
04	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi																														
05	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya																														
06	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang moderen dan terpercaya																														
07	Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan																														
08	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi																														
09	Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat																														
10	Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat																														
11	Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif																														
12	Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (integrated knowledge management) yang terpadu																														
13	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik																														
14	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Pengelolaan Anggaran																														

5. Kode Program : 077.01.01

6. Nama Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2013	Usulan Tahun 2014	Prakiraan Kebutuhan		
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1. Rupiah		65,709.7			
a. Pendamping		0.0			
b. Non Pendamping		65,709.7			
2. PHLN atau PDN		0.0			
JUMLAH	82,844.5	65,709.7	90,000.0	92,238.0	92,238.0

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/OutCome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya Dukungan Administrasi Umum dan Administrasi Yustisial Yang Modern dan Terpercaya	01 Jumlah Media Penyebaran Informasi Publik MK 02 Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Publik 03 Persentase Putusan Pengujian Undang-undang yang

Hasil/Outcome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	dikabulkan MK yang diterjemahkan ke bahasa asing 04 Indeks Aksesabilitas 05 Presentase Putusan dan Ketetapan yang diakses oleh Masyarakat 06 Indeks Pelayanan Penanganan Perkara di MK 07 Persentase Tindak Lanjut terhadap Pengaduan Formal ke MK 08 Opini Laporan Keuangan 09 Tingkat Capaian Kinerja MK

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2014	Prakiraan Target				Prioritas	Dukungan (PPP/ARG/KSST)	Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah	01 Terselenggaranya Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah								Biro Humas dan Protokol
		001 Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis	0	4	4	4	Peraturan	KL	-	
		002 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial	0	3	3	3	Kegiatan	KL	-	
		003 Jumlah bahan publikasi konstitusi dan MK	2	2	2	2	Paket	0	-	
		004 Jumlah kegiatan kehumasan dan keprotokolan	3	4	4	4	Paket	0	-	
		005 Jumlah kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri	4	5	5	5	Paket	0	-	
3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana	01 Terselenggaranya Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana								Biro Perencanaan dan Pengawasan
		001 Jumlah Dokumen Rencana Kerja, Evaluasi Kinerja dan Anggaran	5	6	6	6	Paket	KL	-	
		002 Jumlah Kegiatan Pengawasan, Pengembangan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	4	4	4	4	Paket	KL	-	
3368	Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian Perkara, Perpustakaan, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	01 Terselenggaranya Penelitian, Pengkajian Perkara, Perpustakaan, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi								Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		001 Jumlah Sistem Informasi	3	4	4	4	Paket	KL	-	
		002 Jumlah Penelitian dan Kajian Perkara	5	6	6	6	Paket	KL	-	
		003 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan	1	1	3	3	Paket	KL	-	
3369	Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	01 Terlaksananya Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi								Biro Umum
		001 Jumlah Kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1	5	5	5	Paket	0	-	
		002 Jumlah Kegiatan Kearsipan	3	3	3	3	Paket	0	-	
5237	Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	01 Terselenggaranya Kegiatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK serta Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK								Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
		001 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK	0	0	0	0	Kegiatan	B	-	

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI										
Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2014	Prakiraan Target				Prioritas	Dukungan PPP/ARG/KSST	Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian	01 Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian								Biro Keuangan dan Kepegawaian
		001 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	3	15	15	15	Paket	KL	-	
		002 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran	2	2	2	2	Paket	0	-	

Keterangan :

Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas

Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI

(Juta Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2013	Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Prakiraan Kebutuhan			Lokasi
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5+6+7+8)	(10)	(11)	(12)	(13)
3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah		17,251.9	4,807.2	0.0	0.0	0.0	4,807.2	20,982.3	21,220.3	21,220.3	
3366.01	Terselenggaranya Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah		17,251.9	4,807.2	0.0	0.0	0.0	4,807.2	20,982.3	21,220.3	21,220.3	
3366.01.001	Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis		274.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0	600.0	600.0	
001	Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	QU	274.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0	600.0	600.0	
3366.01.002	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial		274.4 1,414.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	600.0 1,623.9	600.0 1,623.9	600.0 1,623.9	Pusat
002	Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial	QU	1,414.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,623.9	1,623.9	1,623.9	
3366.01.003	Jumlah bahan publikasi konstitusi dan MK		1,414.0 6,300.0	0.0 2,600.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 2,600.0	1,623.9 3,900.0	1,623.9 3,900.0	1,623.9 3,900.0	Pusat
003	Publikasi Konstitusi dan MK	QU	6,300.0	2,600.0	0.0	0.0	0.0	2,600.0	3,900.0	3,900.0	3,900.0	
3366.01.004	Jumlah kegiatan kehumasan dan keprotokolan		6,300.0 899.9	2,600.0 305.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	2,600.0 305.5	3,900.0 848.1	3,900.0 848.1	3,900.0 848.1	Pusat
004	Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan	QU	899.9	305.5	0.0	0.0	0.0	305.5	848.1	848.1	848.1	
3366.01.005	Jumlah kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri		899.9 8,363.6	305.5 1,901.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	305.5 1,901.7	848.1 14,010.3	848.1 14,248.3	848.1 14,248.3	Pusat
005	Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri Dalam Negeri dan Luar Negeri	QU	8,363.6	1,901.7	0.0	0.0	0.0	1,901.7	14,010.3	14,248.3	14,248.3	
3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana		8,363.6 1,568.8	1,901.7 463.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1,901.7 463.6	14,010.3 2,476.8	14,248.3 2,876.8	14,248.3 2,876.8	Pusat
3367.01	Terselenggaranya Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana		1,568.8	463.6	0.0	0.0	0.0	463.6	2,476.8	2,876.8	2,876.8	
3367.01.001	Jumlah Dokumen Rencana Kerja,		930.4	304.9	0.0	0.0	0.0	304.9	1,180.4	1,580.4	1,580.4	

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(Juta Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2013	Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Prakiraan Kebutuhan			Lokasi
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5+6+7+8)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Evaluasi Kinerja dan Anggaran											
001	Dokumen Rencana Kerja, Evaluasi Kinerja dan Anggaran	QU	930.4	304.9	0.0	0.0	0.0	304.9	1,180.4	1,580.4	1,580.4	
3367.01.002	Jumlah Kegiatan Pengawasan, Pengembangan Organisasi dan Reformasi Birokrasi		930.4 638.4	304.9 158.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	304.9 158.7	1,180.4 1,296.4	1,580.4 1,296.4	1,580.4 1,296.4	Pusat
002	Kegiatan Pengawasan, Pengembangan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	QU	638.4	158.7	0.0	0.0	0.0	158.7	1,296.4	1,296.4	1,296.4	
3368	Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian Perkara, Perpustakaan, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi		638.4 8,383.9	158.7 6,607.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	158.7 6,607.1	1,296.4 8,815.4	1,296.4 10,415.4	1,296.4 10,415.4	Pusat
3368.01	Terselenggaranya Penelitian, Pengkajian Perkara, Perpustakaan, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi		8,383.9	6,607.1	0.0	0.0	0.0	6,607.1	8,815.4	10,415.4	10,415.4	
3368.01.001	Jumlah Sistem Informasi		6,413.5	5,068.6	0.0	0.0	0.0	5,068.6	6,045.0	6,045.0	6,045.0	
001	Sistem Teknologi dan Informasi Penanganan Perkara	QU	6,413.5	5,068.6	0.0	0.0	0.0	5,068.6	6,045.0	6,045.0	6,045.0	
3368.01.002	Jumlah Penelitian dan Kajian Perkara		6,413.5 1,835.8	5,068.6 1,471.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	5,068.6 1,471.2	6,045.0 2,635.8	6,045.0 2,635.8	6,045.0 2,635.8	Pusat
002	Penelitian dan Kajian Perkara	QU	1,835.8	1,471.2	0.0	0.0	0.0	1,471.2	2,635.8	2,635.8	2,635.8	
3368.01.003	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan		1,835.8 134.6	1,471.2 67.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	1,471.2 67.3	2,635.8 134.6	2,635.8 1,734.6	2,635.8 1,734.6	Pusat
003	Terselenggaranya Pengelolaan Perpustakaan	QU	134.6	67.3	0.0	0.0	0.0	67.3	134.6	1,734.6	1,734.6	
3369	Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi		134.6 25,678.1	67.3 27,656.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	67.3 27,656.0	134.6 28,761.3	1,734.6 28,761.3	1,734.6 28,761.3	Pusat
3369.01	Terlaksananya Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi		25,678.1	27,656.0	0.0	0.0	0.0	27,656.0	28,761.3	28,761.3	28,761.3	
3369.01.001	Jumlah Kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan		24,962.1	27,352.5	0.0	0.0	0.0	27,352.5	28,045.3	28,045.3	28,045.3	

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(Juta Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2013	Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Prakdraan Kebutuhan			Lokasi
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5+6+7+8)	(10)	(11)	(12)	(13)
001	Kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	OU	268.3	75.6	0.0	0.0	0.0	75.6	768.4	768.4	768.4	
994	Layanan Perkantoran	OU	268.3	75.6	0.0	0.0	0.0	75.6	768.4	768.4	768.4	Pusat
			24,693.8	27,276.9	0.0	0.0	0.0	27,276.9	27,276.9	27,276.9	27,276.9	
3369.01.002	Jumlah Kegiatan Kearsipan		716.0	303.5	0.0	0.0	0.0	303.5	716.0	716.0	716.0	Pusat
002	Kegiatan Kearsipan	OU	716.0	303.5	0.0	0.0	0.0	303.5	716.0	716.0	716.0	
5237	Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi		716.0	303.5	0.0	0.0	0.0	303.5	716.0	716.0	716.0	Pusat
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5237.01	Terselenggaranya Kegiatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK serta Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5237.01.001	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
001	Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK	OU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Pusat
			29,961.8	26,175.8	0.0	0.0	0.0	26,175.8	28,964.2	28,964.2	28,964.2	
5238.01	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian		29,961.8	26,175.8	0.0	0.0	0.0	26,175.8	28,964.2	28,964.2	28,964.2	
5238.01.001	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai		4,037.5	1,155.5	0.0	0.0	0.0	1,155.5	3,943.9	3,943.9	3,943.9	
001	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	OU	4,037.5	1,155.5	0.0	0.0	0.0	1,155.5	3,943.9	3,943.9	3,943.9	
5238.01.002	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran		4,037.5	1,155.5	0.0	0.0	0.0	1,155.5	3,943.9	3,943.9	3,943.9	Pusat
			25,924.3	25,020.3	0.0	0.0	0.0	25,020.3	25,020.3	25,020.3	25,020.3	
002	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran	OU	141.1	141.2	0.0	0.0	0.0	141.2	141.2	141.2	141.2	
			141.1	141.2	0.0	0.0	0.0	141.2	141.2	141.2	141.2	Pusat

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(Juta Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2013	Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Prakiraan Kebutuhan			Lokasi
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5+6+7+8)	(10)	(11)	(12)	(13)
994	Layanan Perkantoran	OU	25.783.2	24.879.1	0.0	0.0	0.0	24.879.1	24.879.1	24.879.1	24.879.1	
			25,783.2	24,879.1	0.0	0.0	0.0	24,879.1	24,879.1	24,879.1	24,879.1	Pusat
TOTAL			82,844.5	65,709.7	0.0	0.0	0.0	65,709.7	90,000.0	92,238.0	92,238.0	

Keterangan :

Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Monday, April 22, 2013

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

SEKRETARIS JENDERAL

Ianedar

4/ IANEDIRIM.GAFFAR

NIP : 196310251988021001



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. Nama Unit Organisasi : Mahkamah Konstitusi RI
3. Misi Unit Organisasi :

No	Misi
01	Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya
02	Membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

4. Sasaran Strategis :

No	Mendukung Sasaran Strategis
01	Terwujudnya layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses
02	Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK
03	Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap MK
04	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
05	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya
06	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang moderen dan terpercaya
07	Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan
08	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi
09	Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat
10	Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat
11	Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif
12	Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (integrated knowledge management) yang terpadu
13	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik
14	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Pengelolaan Anggaran

5. Kode Program : 077.01.02
6. Nama Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI
7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2013	Usulan Tahun 2014	Prakiraan Kebutuhan		
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1. Rupiah		36,014.7			
a. Pendamping		0.0			
b. Non Pendamping		36,014.7			
2. PHLN atau PDN		0.0			
JUMLAH	36,600.0	36,014.7	20,000.0	15,000.0	15,000.0

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/OutCome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Didukung dengan sarana dan Prasarana yang Modern	01 Rasio Peralatan, Perlengkapan, Sarana dan Prasarana Kantor

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2014	Prakiraan Target				Prioritas	Dukungan (PPP/ARG/KSST)	Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	01 Terselenggaranya Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana								Biro Umum
		001 Jumlah Renovasi/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Negara	1	1	1	1	Paket	0	-	
3371	Pengadaan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Gedung	01 Peningkatan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Gedung								Biro Umum
		001 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	5	5	5	Paket	0	-	

Keterangan:

Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas

Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

B. SUMBER PENDANAAN

(02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(Juta Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2013	Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Prakiraan Kebutuhan			Lokasi
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5+6+7+8)	(10)	(11)	(12)	(13)
3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana		0.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	
3370.01	Terselenggaranya Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana		0.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	
3370.01.001	Jumlah Renovasi/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Negara		0.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	
001	Pengembangan gedung	OU	0.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	
3371	Pengadaan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Gedung		0.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	Pusat
			36,600.0	32,514.7	0.0	0.0	0.0	32,514.7	16,500.0	11,500.0	11,500.0	
3371.01	Peningkatan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Gedung		36,600.0	32,514.7	0.0	0.0	0.0	32,514.7	16,500.0	11,500.0	11,500.0	
3371.01.001	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		36,600.0	32,514.7	0.0	0.0	0.0	32,514.7	16,500.0	11,500.0	11,500.0	
001	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OU	36,600.0	32,514.7	0.0	0.0	0.0	32,514.7	16,500.0	11,500.0	11,500.0	
			36,600.0	32,514.7	0.0	0.0	0.0	32,514.7	16,500.0	11,500.0	11,500.0	Pusat
TOTAL			36,600.0	36,014.7	0.0	0.0	0.0	36,014.7	20,000.0	15,000.0	15,000.0	

Keterangan :

Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Monday, April 22, 2013

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

SEKRETARIS JENDERAL

Ianedi

IANEDIRI M. GAFFAR

NIP : 196310251988021001



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

2. Nama Unit Organisasi : Mahkamah Konstitusi Ri

3. Misi Unit Organisasi :

No	Misi
01	Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya
02	Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

4. Sasaran Strategis :

No	Mendukung Sasaran Strategis
01	Terwujudnya layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses
02	Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK
03	Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap MK
04	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
05	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya
06	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang moderen dan terpercaya
07	Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan
08	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi
09	Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat
10	Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat
11	Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif
12	Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (integrated knowledge management) yang terpadu
13	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik
14	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Pengelolaan Anggaran

5. Kode Program : 077.01.06

6. Nama Program : Program Penanganan Perkara Konstitusi

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2013	Usulan Tahun 2014	Prakiraan Kebutuhan		
			Tahun 2015	Tahun 2016.	Tahun 2017
1. Rupiah		86,778.7			
a. Pendamping		0.0			
b. Non Pendamping		86,778.7			
2. PHLN atau PDN		0.0			
JUMLAH	80,396.1	86,778.7	88,000.0	91,000.0	91,000.0

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/OutCome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Penyelesaian Perkara Konstitusi yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	01 Persentase Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang diputus 02 Persentase Jumlah Perkara PHPU Pemilukada yang diputus

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(06) PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2014	Prakiraan Target				Prioritas	Dukungan (PPP/ARG/SKSST)	Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya	01 Terwujudnya Penyelesaian Perkara Konstitusi yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel								Biro Humas dan Protokol
		001 Jumlah Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya yang diputus	247	253	265	265	Perkara	B	-	

Keterangan:

Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas

Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

(Juta Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2013	Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Prakiraan Kebutuhan			Lokasi
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5+6+7+8)	(10)	(11)	(12)	(13)
3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya		80,396.1	86,778.7	0.0	0.0	0.0	86,778.7	88,000.0	91,000.0	91,000.0	
3372.01	Terwujudnya Penyelesaian Perkara Konstitusi yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel		80,396.1	86,778.7	0.0	0.0	0.0	86,778.7	88,000.0	91,000.0	91,000.0	
3372.01.001	Jumlah Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya yang diputus		80,396.1	86,778.7	0.0	0.0	0.0	86,778.7	88,000.0	91,000.0	91,000.0	
001	Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya yang diputus	OU	80,396.1	86,778.7	0.0	0.0	0.0	86,778.7	88,000.0	91,000.0	91,000.0	
			80,396.1	86,778.7	0.0	0.0	0.0	86,778.7	88,000.0	91,000.0	91,000.0	Pusat
	TOTAL		80,396.1	86,778.7	0.0	0.0	0.0	86,778.7	88,000.0	91,000.0	91,000.0	

Keterangan :

Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Monday, April 22, 2013

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

SEKRETARIS JENDERAL



IANEDIRI M. GAFFAR

NIP : 196310251988021001



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. Nama Unit Organisasi : Mahkamah Konstitusi Ri
3. Misi Unit Organisasi :

No	Misi
01	Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya
02	Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

4. Sasaran Strategis :

No	Mendukung Sasaran Strategis
01	Terwujudnya layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses
02	Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK
03	Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap MK
04	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
05	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya
06	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang moderen dan terpercaya
07	Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan
08	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi
09	Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat
10	Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat
11	Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif
12	Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (integrated knowledge management) yang terpadu
13	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik
14	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Pengelolaan Anggaran

5. Kode Program : 077.01.07
6. Nama Program : Program Kesadaran Berkonstitusi
7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2013	Usulan Tahun 2014	Prakiraan Kebutuhan		
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1. Rupiah		0.0			
a. Pendamping		0.0			
b. Non Pendamping		0.0			
2. PHLN atau PDN		0.0			
JUMLAH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/OutCome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Meningkatnya Konstiusionalitas Masyarakat dan Budaya Berkonstitusi	01 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK 02 Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(07) PROGRAM KESADARAN BERKONSTITUSI

Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2014	Prakiraan Target				Prioritas	Dukungan (PPP/ARG/KSST)	Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3373	Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK serta Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK	01 Terlaksananya Kegiatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK serta Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK								Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
		001 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK	0	0	0	0	Kegiatan	B	-	
		002 Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK	0	0	0	0	Kegiatan	B	-	

Keterangan:

Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas

Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM KESADARAN BERKONSTITUSI

(Juta Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2013	Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Prakiraan Kebutuhan			Lokasi
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5+6+7+8)	(10)	(11)	(12)	(13)
3373	Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK serta Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3373.01	Terlaksananya Kegiatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK serta Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3373.01.001	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
001	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK	OU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3373.01.002	Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Pusat
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
002	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK	OU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Pusat
TOTAL			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Keterangan :

Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Monday, April 22, 2013
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
SEKRETARIS JENDERAL


IANEDIRI M. GAFFAR
NIP : 196310251988021001



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2014
(REKAPITULASI UNIT ESELON II)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

UNIT ORGANISASI : Mahkamah Konstitusi Ri

Kode	Unit Organisasi (Eselon II)	Alokasi 2013	Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)		
			Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4+5+6+7)	(9)	(10)	(11)
02	Biro Humas dan Protokol	97,648.0	91,585.9	0.0	0.0	0.0	91,585.9	108,982.3	112,220.3	112,220.3
03	Biro Perencanaan dan Pengawasan	1,568.8	463.6	0.0	0.0	0.0	463.6	2,476.8	2,876.8	2,876.8
04	Biro Umum	62,278.1	63,670.7	0.0	0.0	0.0	63,670.7	48,761.3	43,761.3	43,761.3
05	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	8,383.9	6,607.1	0.0	0.0	0.0	6,607.1	8,815.4	10,415.4	10,415.4
06	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	Biro Keuangan dan Kepegawaian	29,961.8	26,175.8	0.0	0.0	0.0	26,175.8	28,964.2	28,964.2	28,964.2
TOTAL		199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2014
(REKAPITULASI PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

UNIT ORGANISASI : Mahkamah Konstitusi Ri

Kode	Program	Alokasi 2013	Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)		
			Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4+5+6+7)	(9)	(10)	(11)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	82,844.5	65,709.7	0.0	0.0	0.0	65,709.7	90,000.0	92,238.0	92,238.0
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	36,600.0	36,014.7	0.0	0.0	0.0	36,014.7	20,000.0	15,000.0	15,000.0
06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	80,396.1	86,778.7	0.0	0.0	0.0	86,778.7	88,000.0	91,000.0	91,000.0
07	Program Kesadaran Berkonstitusi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL		199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2014
(REKAPITULASI PROVINSI)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

UNIT ORGANISASI : Mahkamah Konstitusi Ri

Kode	Provinsi	Alokasi 2013	Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)		
			Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4+5+6+7)	(9)	(10)	(11)
00	Pusat	199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0
TOTAL		199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0

9



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2014

(REKAPITULASI KABUPATEN/KOTA PER PROVINSI)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

UNIT ORGANISASI : Mahkamah Konstitusi Ri

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi 2013	Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Juta Rupiah)					Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)		
			Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4+5+6+7)	(9)	(10)	(11)
00	Pusat	199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0
00.00	Pusat	199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0
TOTAL		199,840.6	188,503.1	0.0	0.0	0.0	188,503.1	198,000.0	198,238.0	198,238.0



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2014
(RINCIAN KEGIATAN PER PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

UNIT ORGANISASI : Mahkamah Konstitusi RI

(1)	(2)	Anggaran 2013	Usulan Pendanaan Tahun 2014 (Rp. Miliar)					Pemeriksaan Anggaran (Rp. Miliar)		
			Rupiah	PNBP/BDN	PNBP/BBU	SBSN	jumlah	2013	2014	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4+5+6+7)	(9)	(10)	(11)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	82,844.5	65,709.7	0.0	0.0	0.0	65,709.7	90,000.0	92,238.0	92,238.0
3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah	17,251.9	4,807.2	0.0	0.0	0.0	4,807.2	20,982.3	21,220.3	21,220.3
3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana	1,568.8	463.6	0.0	0.0	0.0	463.6	2,476.8	2,876.8	2,876.8
3368	Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian Perkara, Perpustakaan, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	8,383.9	6,607.1	0.0	0.0	0.0	6,607.1	8,815.4	10,415.4	10,415.4
3369	Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	25,678.1	27,656.0	0.0	0.0	0.0	27,656.0	28,761.3	28,761.3	28,761.3
5237	Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian	29,961.8	26,175.8	0.0	0.0	0.0	26,175.8	28,964.2	28,964.2	28,964.2
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	36,600.0	36,014.7	0.0	0.0	0.0	36,014.7	20,000.0	15,000.0	15,000.0
3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	0.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0
3371	Pengadaan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Gedung	36,600.0	32,514.7	0.0	0.0	0.0	32,514.7	16,500.0	11,500.0	11,500.0
06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	80,396.1	86,778.7	0.0	0.0	0.0	86,778.7	88,000.0	91,000.0	91,000.0
3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya	80,396.1	86,778.7	0.0	0.0	0.0	86,778.7	88,000.0	91,000.0	91,000.0
07	Program Kesadaran Berkonstitusi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3373	Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK serta Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL		199,840.6	188,503.7	0.0	0.0	0.0	188,503.7	199,000.0	98,238.0	98,238.0